



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

Laporan Keuangan

Tahun Anggaran
2023
Audited

BAGIAN ANGGARAN 065



**LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN INVESTASI /
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
AUDITED
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta Selatan 12190

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Investasi/BKPM adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Investasi/BKPM. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jakarta, 20 MAY 2024

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Peranaman Modal

Bahri Lohadalia

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	59
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	65
F. Pengungkapan Penting Lainnya	68
VI. Lampiran dan Daftar	74

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM (AUDITED)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM (Audited) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan. Semua Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Investasi/BKPM.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, **07 MAY 2024**



Kukuh Agung Pribadi, S.E.

NIP. 196808171988031003



MENTERI INVESTASI /
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal *Audited* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, **20 MAY 2024**

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal



Bahil Lahadalia
Bahil Lahadalia

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp9.804.636.242,00 atau mencapai 1.017,50 persen dari estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp963.601.000,00. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2023 seluruhnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Realisasi Belanja Negara pada periode Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.094.951.654.261,00 atau mencapai 97,02 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.128.605.685.000,00.

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.372.360.607.746,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp9.804.918.127,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.232.653.190.017,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp129.902.499.602,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp83.465.036.215,00 dan Rp2.288.895.571.531,00.

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp675.091.049,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.096.856.019.544,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(1.096.180.928.495,00).

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(11.193.698.487,00) dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(1.107.374.626.982,00).

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp2.311.419.950.932,00, dikurangi dengan Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp(1.107.374.626.982,00), ditambah dengan koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp(296.770.438,00) dan Transaksi Antar entitas senilai Rp1.085.147.018.019,00, sehingga nilai Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp2.288.895.571.531,00.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		963.601.000	9.804.636.242	1.017,50	7.057.607.366
JUMLAH PENDAPATAN		963.601.000	9.804.636.242	1.017,50	7.057.607.366
BELANJA	B.2				
Belanja Rupiah Murni					
Belanja Pegawai	B.3	158.800.253.000	141.917.304.417	89,37	141.463.615.677
Belanja Barang	B.4	908.933.472.000	893.828.961.599	98,34	1.040.052.421.992
Belanja Modal	B.5	60.871.960.000	59.205.388.245	97,26	44.281.071.098
JUMLAH BELANJA		1.128.605.685.000	1.094.951.654.261	97,02	1.225.797.108.767

Jakarta, 20 Mei 2024

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal

Bahlil Lahadalia

N E R A C A**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	678.341.646	38.258.828
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	598.593.012	680.207.657
Belanja Dibayar Di muka (prepaid)	C.3	7.188.792.542	6.966.376.095
Piutang Bukan Pajak	C.4	20.121.514	14.261.416
Persediaan	C.5	1.319.069.413	1.473.767.831
Jumlah Aset Lancar		9.804.918.127	9.172.871.827
ASET TETAP			
Tanah	C.6	1.959.546.919.000	1.959.546.919.000
Peralatan dan Mesin	C.7	338.922.462.087	350.124.592.914
Gedung dan Bangunan	C.8	286.973.823.275	279.174.857.894
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.9	9.022.115.183	9.022.115.183
Aset Tetap Lainnya	C.10	1.447.207.849	1.060.422.649
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	(363.259.337.377)	(353.740.377.580)
Jumlah Aset Tetap		2.232.653.190.017	2.245.188.530.060
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.12	102.047.984.612	167.515.355.087
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.13	79.696.684.428	-
Aset Lain-lain	C.14	24.239.552.857	6.410.421.679
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.15	(76.081.722.295)	(114.121.352.273)
Jumlah Aset Lainnya		129.902.499.602	59.804.424.493
JUMLAH ASET		2.372.360.607.746	2.314.165.826.380
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	81.012.548.924	1.506.970.917
Pendapatan Diterima di Muka	C.17	1.770.863.838	1.200.645.703
Uang Muka dari KPPN	C.18	678.341.646	38.258.828
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.19	3.281.807	-
JUMLAH KEWAJIBAN		83.465.036.215	2.745.875.448
EKUITAS			
Ekuitas	C.20	2.288.895.571.531	2.311.419.950.932
JUMLAH EKUITAS		2.288.895.571.531	2.311.419.950.932
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.372.360.607.746	2.314.165.826.380



Jakarta, 20 Mei 2024

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal

Bahri Lahadalia

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	675.091.049	643.071.791
JUMLAH PENDAPATAN		675.091.049	643.071.791
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	142.126.401.683	137.228.785.604
Beban Persediaan	D.3	5.083.250.300	5.907.040.920
Beban Barang dan Jasa	D.4	664.987.750.735	833.833.086.007
Beban Pemeliharaan	D.5	17.718.756.735	15.816.280.522
Beban Perjalanan Dinas	D.6	203.840.036.292	186.729.722.088
Beban Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.7	1.347.090	5.746.361.520
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	63.098.476.709	60.213.193.832
JUMLAH BEBAN		1.096.856.019.544	1.245.474.470.493
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.096.180.928.495)	(1.244.831.398.702)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.9		
PENDAPATAN		8.468.762.419	5.320.341.591
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		147.889.999	
Pendapatan dari Kegiatan Non Ops Lainnya		8.320.872.420	5.320.341.591
BEBAN		19.662.460.906	54.312.943
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		19.662.459.303	0
Beban dari Kegiatan Non Ops Lainnya		1.603	54.312.943
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(11.193.698.487)	5.266.028.648
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.107.374.626.982)	(1.239.565.370.054)
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.107.374.626.982)	(1.239.565.370.054)

Jakarta, 20 Mei 2024

 Menteri Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal


Bafni Lihadalia

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	2.311.419.950.932	2.306.396.990.137
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.107.374.626.982)	(1.239.565.370.054)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(296.770.438)	(1.444.170.552)
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	98.990.825	12.829.200
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.6	(433.022.763)	(1.456.999.752)
Koreksi Lain-lain	E.7	37.261.500	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	1.085.147.018.019	1.246.032.501.401
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(22.524.379.401)	5.022.960.795
EKUITAS AKHIR	E.9	2.288.895.571.531	2.311.419.950.932

Jakarta, 20 Mei 2024

Menteri Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal



Bahar Lahaadalia

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE TAHUN ANGGARAN 2023

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penanaman modal sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

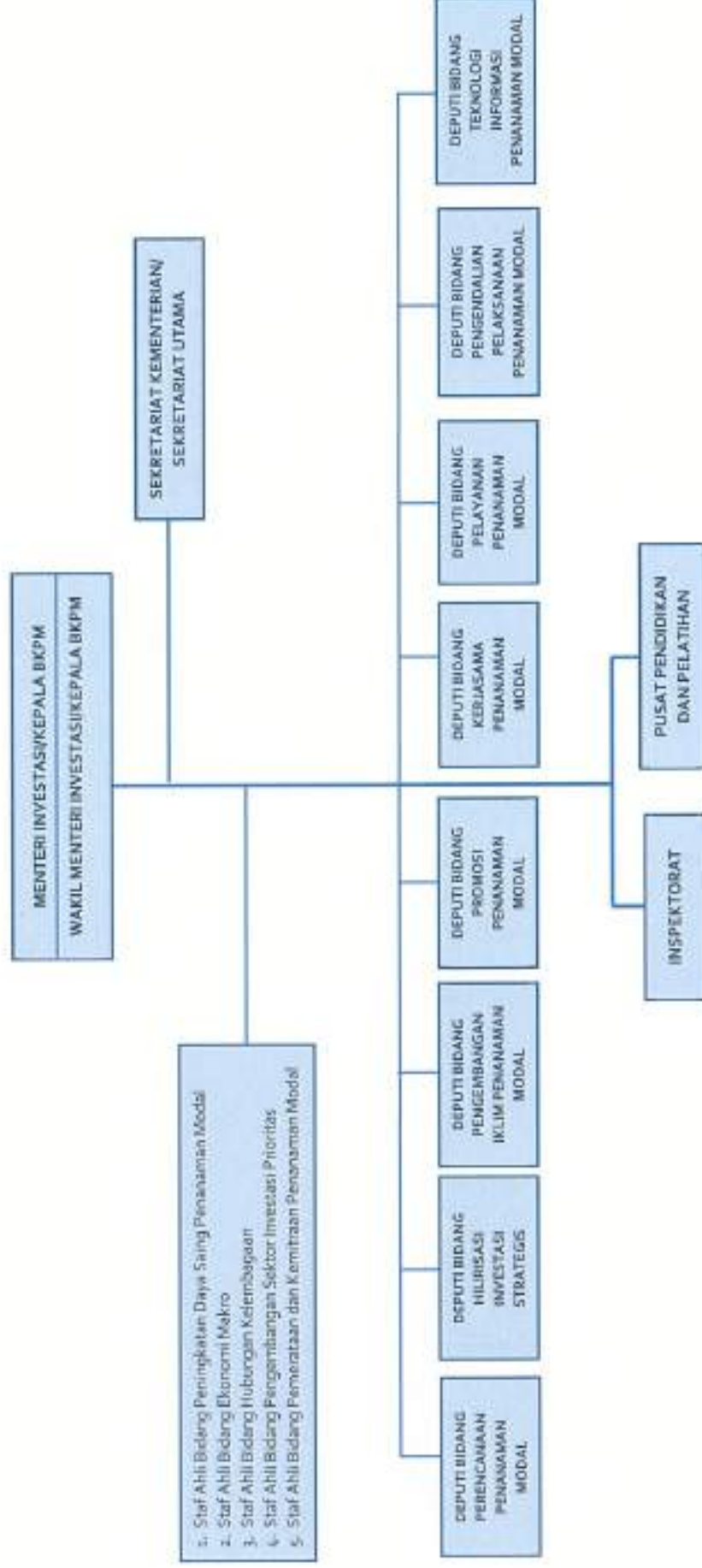
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal resmi ditetapkan sebagai Kementerian Negara dengan nama **Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal**.

Kementerian Investasi/BKPM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Struktur organisasi Kementerian Investasi/BKPM telah ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan susunan kelembagaan sebagaimana dapat dilihat pada Bagan 1 sebagai berikut:

Bagan A.1.

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 dimaksud, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal terdiri atas:

	a. Menteri Investasi/Kepala BKPM;
	b. Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM;
Eselon I:	c. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama;
	d. Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
	e. Deputy Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
	f. Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
	g. Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal;
	h. Deputy Bidang Kerjasama Penanaman Modal;
	i. Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
	j. Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
	k. Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal;
Staf Ahli:	j. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal;
	k. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;
	l. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
	m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas;
	n. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal;
Eselon II Mandiri:	o. Inspektorat;
	p. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional maka Kementerian Investasi/BKPM telah menetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi BKPM sebelumnya serta mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu:

VISI

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

MISI

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata Kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu **"Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian"** sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta tujuan Kementerian Investasi/BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

TARGET SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM TA. 2023

Seluruh pelaksanaan kegiatan dan anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023 dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM kemudian dituangkan dalam target kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel A.1.
TARGET KINERJA KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja	Target
<i>Sasaran Strategis 1: Meningkatnya realisasi penanaman modal</i>		
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal - (Rp Triliun)	1099,8*
2	Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder - (Rp Triliun)	483,9
3	Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di luar Jawa) - (%)	50,6
4	Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM - (%)	51,9
<i>Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal</i>		
5	Peringkat Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) - (Peringkat EoDB)	45
<i>Sasaran Strategis 3: Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani</i>		
6	Nilai reformasi birokrasi BKPM - (Predikat/Nilai)	80
7	Opini atas Laporan Keuangan BKPM - (Opini BPK)	WTP

*) Atas arahan Presiden Jokowi, target investasi tahun 2023 ditingkatkan menjadi Rp 1.400 Triliun

Terdapat target Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of doing Business*) yang tidak dapat ditayangkan nilai realisasinya disebabkan Bank Dunia selaku institusi yang menerbitkan peringkat EoDB menghentikan sementara laporan indeks kemudahan berusahnya pada 16 September 2021. Namun demikian Kementerian Investasi/BKPM tetap berkomitmen untuk memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia yang meliputi penyederhanaan prosedur, percepatan waktu, integrasi dan peningkatan efisiensi serta penguatan transparansi.

Keterkaitan antara rencana strategis dengan program kerja dan realisasi penyerapan anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel A.2.
REALISASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM KERJA TAHUN 2023

(Dalam Rupiah)

No	Program Kerja	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	%
1	Program Penanaman Modal	1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal 2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal	396.144.568.000	370.933.568.525	93,64
2	Program Dukungan Manajemen	3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	732.461.117.000	724.018.085.736	98,85
JUMLAH			1.128.605.685.000	1.094.951.654.261	97,02

PROGRAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Dalam rangka operasional pencegahan dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM, pada Tahun 2023 telah dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp902.208.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp861.265.304,00 sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	%
1	Belanja Barang	902.208.000	861.265.304	95,46
JUMLAH		902.208.000	861.265.304	95,46

Biaya operasional dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanganan dampak pandemi COVID-19 pada Kementerian Investasi/BKPM digunakan antara lain untuk paket Langganan akun Zoom, pembelian Masker dan *Hand Sanitizer*.

Rincian pagu dan realisasi biaya operasional dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 untuk masing-masing Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM disajikan dalam **Lampiran 1** Laporan Keuangan ini.

PENGELOLAAN APBN TAHUN 2023

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, Kementerian Investasi/BKPM merupakan entitas akuntansi yang memiliki 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari 9

(sembilan) Satuan Kerja Pusat dan 34 (tiga puluh empat) Satuan Kerja Dekonsentrasi dengan rincian sebagai berikut:

SATKER PUSAT		
No	Kode Satker	Nama Satker
1	017202	Sekretariat Utama
2	650102	Deputi Bidang Hilirisasi Informasi Strategis
3	650103	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
4	664848	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
5	664852	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
6	664869	Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal
7	664873	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
8	664880	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
9	670650	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
SATKER DEKONSENTRASI		
No	Kode Satker	Nama Satker
1	029002	DPMP TSP Provinsi Jawa Barat
2	039002	DPMP TSP Provinsi Jawa Tengah
3	049001	DPMP TSP Provinsi DIY
4	050016	DPMP TSP Provinsi Jawa Timur
5	060038	DPMP TSP Nangroe Aceh Darussalam
6	079001	DPMP TSP Provinsi Sumatera Utara
7	080022	DPMP TSP Provinsi Sumatera Barat
8	099001	DPMP TSP Provinsi Riau
9	100098	DPMP TSP Provinsi Jambi
10	119002	DPMP TSP Provinsi Sumatera Selatan
11	120020	DPMP TSP Provinsi Lampung
12	139001	DPMP TSP Provinsi Kalimantan Barat
13	140020	DPMP TSP Provinsi Kalimantan Tengah
14	159002	DPMP TSP Provinsi Kalimantan Selatan
15	169001	DPMP TSP Provinsi Kalimantan Timur
16	170029	DPMP TSP Provinsi Sulawesi Utara
17	180015	DPMP TSP Provinsi Sulawesi Tengah
18	190099	DPMP TSP Provinsi Sulawesi Selatan
19	200028	DPMP TSP Provinsi Sulawesi Tenggara
20	210023	DPMP TSP Provinsi Maluku
21	220022	DPMP TSP Provinsi Bali
22	230024	DPMP TSP Provinsi Nusa Tenggara Barat
23	249002	DPMP TSP Provinsi Nusa Tenggara Timur
24	250024	DPMP TSP Provinsi Papua
25	260028	DPMP TSP Provinsi Bengkulu
26	280023	DPMP TSP Provinsi Maluku Utara
27	290018	DPMP TSP Provinsi Banten
28	300015	DPMP TSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
29	310090	DPMP TSP Provinsi Gorontalo
30	320082	DPMP TSP Provinsi Kepulauan Riau

No	Kode Satker	Nama Satker
31	330082	DPMTSP Provinsi Papua Barat
32	340096	DPMTSP Provinsi Sulawesi Barat
33	417745	DPMTSP Provinsi Kalimantan Utara
34	650101	DPMTSP Provinsi DKI Jakarta

Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023 merupakan Laporan Keuangan yang dihasilkan dari konsolidasi Laporan Keuangan 9 (sembilan) Satker Pusat dan 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Penyusunan Laporan Keuangan pada SAKTI dilakukan menggunakan modul GL dan modul pelaporan. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Barang Milik Negara.

Basis
Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian Investasi/BKPM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar
Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Investasi/BKPM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan
Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM adalah sebagai berikut:

Pendapatan -
LRA

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan -
LO

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Investasi/BKPM adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari peristiwa luar biasa.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.5.
PENYISIHAN PIUTANG

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Penyisihan piutang tak tertagih pada Kementerian Investasi/BKPM tidak dilakukan untuk piutang belanja pegawai yang dapat dikompensasikan pembayarannya melalui potongan Surat Perintah

Membayar (SPM).

- Persediaan dicatat menggunakan metode pencatatan *Perpetual*. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), di mana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

b. Aset Tetap

- Aset Tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol.
Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada Pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan

dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

C. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.6.
MASA MANFAAT ASET TETAP

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan)	4 tahun

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.7.
MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan
pagu
anggaran

Pagu Anggaran yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.128.605.685.000,00. Rincian pagu anggaran berdasarkan jenis belanja disajikan sebagai berikut:

Tabel B.1.

PAGU ANGGARAN PER JENIS BELANJA T.A. 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	T.A. 2023	
	Pagu Awal	Pagu Perubahan
Belanja Pegawai	160.800.253.000	158.800.253.000
Belanja Barang	869.228.043.000	906.933.472.000
Belanja Modal	64.193.750.000	60.871.960.000
Jumlah	1.094.222.046.000	1.128.605.685.000

Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan program kerja, rincian pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM adalah sebagai berikut:

Tabel B.2.

PAGU ANGGARAN PER PROGRAM KERJA T.A. 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian Program Kerja	Pagu Awal	Pagu Perubahan
Program Dukungan Manajemen	392.644.568.000	396.144.568.000
Program Penanaman Modal	701.577.478.000	732.461.117.000
Jumlah	1.094.222.046.000	1.128.605.685.000

Pada periode Tahun Anggaran 2023 terdapat revisi anggaran yang mengakibatkan pagu total yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM mengalami perubahan. Semula ditetapkan sebesar Rp1.094.222.046.000,00 meningkat menjadi sebesar Rp1.128.605.685.000,00 yang disebabkan oleh:

1. Penambahan anggaran BA-BUN sebesar Rp37.760.000.000,00 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-124/MK.2/2023 tanggal 3 Mei 2023 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA-BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (BA 065) untuk Tambahan Anggaran TA 2023 (Revisi DIPA ke IV);
2. Perubahan anggaran antar Satuan Kerja berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-401/AG/AG.3/2023 tanggal 20 Juli 2023 hal Pengesahan

- Revisi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2023 (Revisi DIPA ke V);
3. Perubahan anggaran akibat kebijakan relaksasi anggaran Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-230/MK.2/2023 tanggal 28 Juli 2023 hal Persetujuan Relaksasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2023 Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2023 (Revisi DIPA ke VI);
 4. Perubahan anggaran antar Satuan Kerja berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-585/AG/AG.3/2023 tanggal 27 September 2023 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2023 (Revisi DIPA ke VII);
 5. Perubahan anggaran akibat revisi pengurangan alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-680/AG/AG.3/2023 tanggal 21 Oktober 2023 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2023 (Revisi DIPA ke VIII);
 6. Perubahan anggaran akibat realokasi dan optimalisasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-788/AG/AG.3/2023 tanggal 6 November 2023 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2023 (Revisi DIPA ke IX).

Rincian perubahan alokasi anggaran Kementerian Investasi BKPM Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam tabel pada **Lampiran 2**.

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.804.636.242,00 atau mencapai 1.017,50 persen dari estimasi penerimaan negara bukan pajak pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp963.601.000,00. Peningkatan pendapatan mencapai 1.017,50 persen sebagian besar disebabkan adanya penerimaan dari pendapatan sewa BMN dan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan Kementerian Investasi/BKPM pada Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel B.1.1.
ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	963.601.000	9.804.636.242	1.017,50
Jumlah	963.601.000	9.804.636.242	1.017,50

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.804.636.242,00 seluruhnya berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN	1.377.554.999
2	Pendapatan Bunga dan Pengelolaan Rekening Perbankan	255.823
3	Pendapatan Denda	10.584.134
4	Pendapatan Lain-lain	8.416.241.286
Total		9.804.636.242

1. Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN

Pendapatan dari penjualan dan pengelolaan BMN sebesar Rp1.377.554.999,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama dengan rincian sebagai berikut:

- A. Pendapatan sewa atas Sebagian Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.229.665.000,00 berasal dari:
- 1) Pembayaran sewa ruang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp259.825.000,00 berdasarkan Surat Menteri Keuangan hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor S-64/MK.6/KNL.0701/2023 tanggal 16 Maret 2023.
 - 2) Pembayaran sewa ruang PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebesar Rp671.306.000,00 berdasarkan Surat Menteri Keuangan hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor S-55/MK.6/KNL.0701/2023 tanggal 7 Maret 2023.
 - 3) Pembayaran sewa ruang Koperasi Karyawan BKPM "Pecanderaan" sebesar Rp298.534.000,00 berdasarkan Surat Menteri Keuangan hal Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Sewa Pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor S-196/MK.6/KNL.0701/2023 tanggal 6 September 2023.
- B. Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin berasal dari hasil lelang atas peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat pada Sekretariat Utama

Kementerian Investasi/BKPM sebesar Rp147.889.999,00 berdasarkan Risalah Lelang Nomor RL-473/25/2023 tanggal 6 September 2023.

2. Pendapatan Bunga dan Pengelolaan Rekening Perbankan

Pendapatan bunga sebesar Rp255.823,00 berasal dari:

- A. Pendapatan bunga pada Satker Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal sebesar Rp254.400,00 berupa Bunga Bank pada rekening IIPC Seoul senilai Rp96.228,00, IIPC Taipei senilai Rp146.000,00, serta IIPC London senilai Rp12.172,00.
- B. Pendapatan bunga Satker Sekretariat Utama berupa Bunga Bank atas Rekening Pengeluaran Lainnya senilai Rp1.423,00.

3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp10.584.134,00 berasal dari:

- A. Satker Sekretariat Utama berupa:
 - 1. Pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi renovasi Masjid Al-Ihsan Kementerian Investasi/BKPM oleh PT Tri Harja Utama sebesar Rp1.685.194,00.
 - 2. Pengenaan denda atas keterlambatan pekerjaan pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Penyerapan Anggaran (SIMAPAN) oleh CV. Putra Purnama Indonesia sebesar Rp234.160,00.
 - 3. Pengenaan denda atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan *Loose Furniture* Ruang kerja Lantai 7 Gedung Ismail Saleh Kementerian Investasi/BKPM oleh PT. Inter Kreasi Adhitama sebesar Rp1.294.806,00.
 - 4. Pengenaan denda atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan *Loose Furniture* Ruang kerja Lantai 8 Gedung Ismail Saleh Kementerian Investasi/BKPM oleh PT. Inter Kreasi Adhitama sebesar Rp3.950.375,00.
 - 5. Pengenaan denda atas Keterlambatan Penyelesaian Pengadaan Kegiatan Layanan Advertorial di Media Nasional TA. 2023 oleh PT. Erzhan Inovatif Solusi sebesar Rp2.300.000,00.
- B. Satker Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, berupa Pengenaan denda atas Keterlambatan Penyelesaian Penyusunan Kajian Pengembangan Industri Olefin Dalam Kerangka Substitusi Impor Tahun Anggaran 2023 oleh Institut Teknologi Bandung sebesar Rp1.119.599,00.

4. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain sebesar Rp8.416.241.286,00 berasal dari:

- A. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp157.044.280,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai TA 2022;
- B. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp8.219.984.991,00 berasal dari:
 - 1) Satker Sekretariat Utama sebesar Rp220.786.629,00 berupa:
 - a) Pengembalian honorarium kegiatan unit Protokol bulan April s.d. Desember TA. 2022 sebesar Rp128.250.000,00;
 - b) Pengembalian sisa Dana Operasional Menteri (DOM) TA. 2022 sebesar Rp13.729,00;
 - c) Pengembalian kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp83.522.900,00.
 - d) Pengembalian kelebihan biaya operasional a.n Aditya Dwihutama Sumaryanto sebesar Rp9.000.000,00.
 - 2) Satker Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis sebesar Rp59.488.855,00 yang seluruhnya berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan *Roadmap* Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi TA. 2022;
 - 3) Satker Teknologi Informasi sebesar Rp1.481.000,00 yang seluruhnya merupakan pengembalian kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas TA. 2022;
 - 4) Satker Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp2.430.000,00 yang seluruhnya merupakan pengembalian kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas.
 - 5) Satker Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal sebesar Rp3.441.649.633,00 berupa:
 - a) Pengembalian kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas TA. 2022 sebesar Rp152.316.850,00;
 - b) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Relokasi dan Diversifikasi Perusahaan Asing ke Indonesia TA. 2022 sebesar Rp3.219.712.537,00;
 - c) Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan Penayangan Iklan di Media Aljazeera TA. 2022 sebesar Rp10.768.498,00;

- d) Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan Penayangan Promosi Investasi di Media Elektronik Wilayah Timur Tengah dan Afrika TA 2022 sebesar Rp56.261.261,00.
 - e) Pengembalian kelebihan pembayaran atas biaya sewa kantor *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC) London sebesar Rp2.590.487,00.
- 6) Satker Deputi Bidang Pelayanan sebesar Rp352.966.716,00 berupa:
- a) Pengembalian kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas TA. 2022 sebesar Rp3.310.000,00.
 - b) Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada Pelaku Usaha Menengah Kecil (UMK) TA. 2022 oleh PT Quindo Indonesia Cemerlang sebesar Rp349.656.716,00.
- 7) Satker Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp412.816.669,00 berupa:
- a) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Satuan Tugas Percepatan Investasi TA. 2022 senilai Rp180.686.903,00
 - b) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Eksekusi Realisasi Investasi Wilayah Barat TA. 2022 senilai Rp175.960.795,00;
 - c) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Eksekusi Realisasi Penerima Fasilitas Penanaman Modal TA. 2022 senilai Rp25.000.819,00;
 - d) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM senilai Rp10.756.619,00;
 - e) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Eksekusi Realisasi Investasi Wilayah Timur senilai Rp20.411.533,00.
- 8) Satker Deputi Bidang Perencanaan sebesar Rp3.728.365.489,00 yang seluruhnya merupakan pengembalian kelebihan belanja TA. 2022 dengan rincian:
- a) Pengembalian kelebihan pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis sebesar Rp3.726.495.489,00.
 - b) Pengembalian kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp1.870.000,00.

- C. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp34.585.897,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama atas kelebihan pembayaran pekerjaan Jasa konstruksi Renovasi Masjid Al-Ihsan Kementerian Investasi/BKPM TA 2022.
- D. Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp4.626.118,00 berasal dari:
- Pengembalian deposit sewa kantor IIPC London pada Satker Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal sebesar Rp3.642.641,00.
 - Pendapatan berupa Bunga Bank pada kantor IIPC Beijing dan IIPC Seoul pada Satker Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal masing-masing sebesar Rp160.065,00 dan Rp186.540,00
 - Kelebihan setoran pengembalian sisa TUP TA. 2023 sebesar Rp634.872,00 pada Satker Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal.
 - Kelebihan setoran pengembalian sisa UP TA. 2023 sebesar Rp2.000,00 pada Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

Rincian Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 bila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 38,92 persen.

Tabel B.1.2.

PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN T.A. 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022	% Naik/(Turun)
Pendapatan dari Penjualan, pengelolaan BMN, iuran Badan Usaha	1.377.554.999	1.262.847.000	9,08
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	255.823	3.359.723	(92,39)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	10.584.134	1.474.545	617,79
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	157.044.280	230.424.914	(31,85)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	8.219.984.991	5.442.964.706	51,02
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	34.585.897	113.414.709	(69,50)
Pendapatan Lain-lain	4.626.118	3.121.769	48,19
Jumlah	9.804.636.242	7.057.607.366	38,92

Peningkatan pendapatan pada tahun 2023 sebagian besar berasal dari peningkatan nilai Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL.

B.2 Belanja

Realisasi
Belanja
Negara

Belanja Rupiah Murni

Realisasi Belanja Kementerian Investasi/BKPM pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.094.951.654.261,00 atau mencapai 97,02 persen dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp1.128.605.685.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel B.2.1.
PAGU DAN REALISASI PER JENIS BELANJA T.A. 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	158.800.253.000	141.917.304.417	89,37
Belanja Barang	908.933.472.000	893.828.961.599	98,34
Belanja Modal	60.871.960.000	59.205.388.245	97,26
Jumlah	1.128.605.685.000	1.094.951.654.261	97,02

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik B.2.1.
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam Miliar Rupiah)



B.3 Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp141.917.304.417,00 dan Rp141.463.615.677,00.

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,32 persen dari realisasi belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel B.3.1.

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA PEGAWAI T.A. 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022	% Naik/(Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	78.476.832.021	78.714.045.854	(0,30)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	2.098.787.500	2.098.787.500	0,00
Belanja Honorarium	6.337.872.110	6.457.245.645	(1,85)
Belanja Lembur	67.402.000	52.813.000	27,62
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	55.991.045.562	55.240.626.970	1,36
Jumlah Belanja Kotor	142.971.939.193	142.563.518.969	0,29
Pengembalian Belanja	1.054.634.776	1.099.903.292	(4,12)
Jumlah Belanja	141.917.304.417	141.463.615.677	0,32

Peningkatan realisasi belanja pegawai antara lain berasal dari pembayaran belanja lembur dan pembayaran belanja tunjangan khusus & pegawai transito. Rincian Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel B.3.2.

RINCIAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI T.A. 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi	Pengembalian Belanja	Realisasi Netto
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	78.476.832.021	1.030.269.931	77.446.562.090
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	2.098.787.500	-	2.098.787.500
Belanja Honorarium	6.337.872.110	-	6.337.872.110
Belanja Lembur	67.402.000	853.100	66.548.900
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	55.991.045.562	23.511.745	55.967.533.817
Jumlah	142.971.939.193	1.054.634.776	141.917.304.417

Belanja
Barang

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp893.828.961.599,00 dan Rp1.040.052.421.992,00. Belanja barang merupakan pengeluaran anggaran untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah, belanja perjalanan, dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 14,06 persen dari Realisasi Belanja Barang pada periode yang sama di Tahun 2022. Hal ini disebabkan antara lain penurunan Belanja Jasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Tabel B.4.1.

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA BARANG T.A. 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022	% Naik/(Turun)
Belanja Barang Operasional	44.173.588.075	37.306.331.810	18,41
Belanja Barang Non Operasional	61.458.072.833	48.529.768.782	26,64
Belanja Barang Persediaan	4.758.204.909	4.460.702.439	6,67
Belanja Jasa	562.401.856.586	747.386.610.959	(24,75)
Belanja Pemeliharaan	17.611.865.143	15.812.646.554	11,38
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	121.942.909.567	141.123.086.277	(13,59)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	82.142.216.482	45.611.706.511	80,09
Jumlah Belanja Kotor	894.488.713.595	1.040.230.853.332	(14,01)
Pengembalian Belanja	659.751.996	178.431.340	269,75
Jumlah Belanja	893.828.961.599	1.040.052.421.992	(14,06)

Rincian Pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel B.4.2.

RINCIAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA BARANG T.A. 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi	Pengembalian Belanja	Realisasi Netto
Belanja Barang Operasional	44.173.588.075	90.671.107	44.082.916.968
Belanja Barang Non Operasional	61.458.072.833	6.412.500	61.451.660.333
Belanja Barang Persediaan	4.758.204.909	-	4.758.204.909
Belanja Jasa	562.401.856.586	296.558.632	562.105.297.954
Belanja Pemeliharaan	17.611.865.143	-	17.611.865.143
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	121.942.909.567	86.066.215	121.856.843.352
Belanja Perjalanan Luar Negeri	82.142.216.482	180.043.542	81.962.172.940
Jumlah	894.488.713.595	659.751.996	893.828.961.599

Belanja Barang - Akun khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Dari total pagu anggaran belanja barang tahun 2023 sebesar Rp1.128.605.685.000,00, Kementerian Investasi/BKPM mengalokasikan anggaran belanja barang menggunakan akun khusus penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp902.208.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2023 anggaran tersebut telah terserap sebesar Rp861.265.304,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel B.4.3.**RINCIAN REALISASI BELANJA BARANG – PENANGANAN PANDEMI COVID-19**

(Dalam Rupiah)

Akun – Uraian Akun	Pagu	Realisasi	% Real Angg.
521131 Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	687.877.000	659.887.304	95,93
522192 Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	214.331.000	201.378.000	93,96
Jumlah	902.208.000	861.265.304	95,46

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp59.205.388.245,00 dan Rp44.281.071.098,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar 33,70 persen dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2022. Hal ini disebabkan antara lain peningkatan belanja modal peralatan dan mesin, peningkatan belanja modal gedung dan bangunan, dan peningkatan belanja modal lainnya.

Tabel B.5.1.**PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL T.A. 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.574.902.084	9.806.660.721	140,40
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.891.440.961	7.075.267.850	11,54
Belanja Modal Lainnya	27.739.045.200	27.399.142.527	1,24
Jumlah Belanja Kotor	59.205.388.245	44.281.071.098	33,70
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	59.205.388.245	44.281.071.098	33,70

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp23.574.902.084,00 dan Rp9.806.660.721,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 meningkat sebesar 140,40 persen dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2022.

Tabel B.5.1.1.

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN T.A. 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.574.902.084	9.806.660.721	140,40
Jumlah Belanja	23.574.902.084	9.806.660.721	140,40

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.891.440.961,00 dan Rp7.075.267.850,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 11,54 persen dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2022.

Tabel B.5.2.

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN T.A. 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.891.440.961	7.075.267.850	11,54
Jumlah Belanja	7.891.440.961	7.075.267.850	11,54

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp27.739.045.200,00 dan Rp27.399.142.527,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,24 persen dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2022.

Tabel B.5.3.

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL LAINNYA T.A. 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Lainnya	27.739.045.200	27.399.142.527	1,24
Jumlah Belanja	27.739.045.200	27.399.142.527	1,24

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Investasi/BKPM per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp678.341.646,00 dan Rp38.258.828,00. Rincian sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat disajikan pada **Lampiran 3** Laporan Keuangan ini.

Tabel C.1.
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	678.341.646	38.258.828
JUMLAH	678.341.646	38.258.828

Seluruh Sisa Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 telah disetorkan ke kas negara pada awal bulan Januari 2024. Rincian penyetoran saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satuan Kerja disajikan sebagai berikut:

Tabel C.1.1
RINCIAN PENYETORAN SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

(Dalam Rupiah)

No	SATUAN KERJA	NTPN	TANGGAL	JUMLAH
1	Sekretariat Utama	AA5496QT9C050JV9	8-Jan-24	266.998.341
2	Deputi PIPM	390CD397A1N6F387	10-Jan-24	130.000
3	Deputi Kerjasama PM	5888D0JUQK0APC2U	11-Jan-24	89.831.635
4	Deputi Kerjasama PM	C7FFB7NAP6JE1C36	11-Jan-24	971.850
5	Deputi Pelayanan PM	9A7DF7NAP6IHDKJU	8-Jan-24	84.836.683
6	Deputi Pengendalian Pelaksanaan PM	D69DESUFPHDOJK80	8-Jan-24	231.720.205
7	Deputi Perencanaan PM	0D2B07NAP6IQU54	9-Jan-24	3.852.932
JUMLAH				678.341.646

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp598.593.012,00 dan Rp680.207.657,00.

Tabel C.2.1
KAS LAINNYA DAN SETARA KAS PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
Kas Lainnya dan Setara Kas	598.593.012	680.207.657
JUMLAH	598.593.012	680.207.657

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp598.593.012,00 terdiri dari:

Tabel C.2.2
DAFTAR RINCIAN KAS LAINNYA DAN SETARA KAS PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH
1	SEKRETARIAT UTAMA	595.108.048
	LS Belanja Pegawai Kantor Pusat Yang Belum Dibagikan	593.639.461
	Langganan Koran IIPC Sydney yang belum dibayarkan	1.468.587
2	DEPUTI BIDANG PROMOSI PM	203.157
	Bunga bank pada rekening IIPC yang belum disetor	203.157
3	DPMTSP PROV. KALIMANTAN TIMUR	3.281.807
	Utang Pajak Bendahara yang belum disetor	3.281.807
	JUMLAH	598.593.012

C.3 Belanja Dibayar Di muka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar
Dimuka

Saldo Belanja Dibayar Di muka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.188.792.542,00 dan Rp6.966.376.095,00.

Tabel C.3.
BELANJA DIBAYAR DIMUKA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
Belanja Dibayar Di muka (Prepaid)	7.188.792.542	6.966.376.095
JUMLAH	7.188.792.542	6.966.376.095

Belanja Dibayar Di muka (*Prepaid*) merupakan pengeluaran Satuan Kerja/Pemerintah yang telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati Satuan Kerja/Pemerintah. Saldo Belanja Dibayar Di muka (*Prepaid*) per 31 Desember 2023 dan 2022 berasal dari:

Tabel C.3.1
RINCIAN BELANJA DIBAYAR DIMUKA MENURUT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	NILAI	
	2023	2022
Satker Sekretariat Utama	68.013.644	185.729.680
1. Perpanjangan IP Publik (2x254) dan domain (bkpm.go.id, oss.go.id, investindonesia.go.id)	3.906.690	106.125.255
2. Potongan Presensi Pegawai Bulan Desember	64.106.954	79.604.425
Satker Deputi Bidang Teknologi Informasi	7.120.778.898	6.780.646.415
1. Lisensi Annual Technical Support (ATS)	1.552.177.775	1.397.813.061
2. Lisensi Business Intelligence	968.771.467	913.408.282
3. Lisensi Office 365	419.209.972	284.399.500
4. Lisensi Email Blast	-	571.239
5. Lisensi Software Microservices	2.346.587.059	2.403.416.641
6. Lisensi Application Monitoring System	1.834.032.625	1.781.037.692
JUMLAH	7.188.792.542	6.966.376.095

C.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.121.514,00 dan Rp14.261.416,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Tabel C.4.
PIUTANG BUKAN PAJAK PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
 (Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
Piutang Bukan Pajak	20.121.514	14.261.416
JUMLAH	20.121.514	14.261.416

Perbandingan rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022
1	Bayu Tri Armityo, S.H.	-	1.386.550
2	Yusmiati	-	3.139.866
3	Sdr. Trino Prayoga S.H.	-	370.000
4	Agustina, S.E., M.E.	-	185.000
5	Bagus Hariadi Wonosastro, S.Hut	-	2.700.000
6	Dian Mustika Pratiwi S.Stat., M.Sc.	-	2.700.000
7	Tria Hesti Saptari S. Sos.	630.000	3.780.000
9	Panahatan Martin Yosep S.E.	1.105.444	-
10	Sopyan	1.263.860	-
11	Usamah Widiatmoko	4.556.800	-
12	Andi Muhammad Falz Adani Adnan, S.H.	2.603.000	-
13	Nurman Hidayat, S.T.	9.951.410	-
	JUMLAH	20.121.514	14.261.416

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa kelebihan pembayaran belanja pegawai.

C.5 Persediaan

Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.319.069.413,00 dan Rp1.473.767.831,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tabel C.5.
PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
Persediaan	1.319.069.413	1.473.767.831
JUMLAH	1.319.069.413	1.473.767.831

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 seluruhnya merupakan Barang Konsumsi dengan Rincian mutasi selama Tahun 2023 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2022	1.473.767.831
Mutasi tambah:	4.944.314.984
Pembelian	4.758.204.909
Perolehan Lainnya	87.119.250
Koreksi nilai persediaan – Hasil Inventarisasi	98.990.825
Mutasi kurang:	5.099.013.402
Pemakaian Persediaan Barang Konsumsi	5.083.250.300
Pemakaian Persediaan Barang Pemeliharaan	14.416.012
Pemakaian Persediaan Pita Cukai Materi Leges	1.347.090
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	1.319.069.413

Mutasi Tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp4.944.314.984,00 berasal dari:

- Pembelian persediaan menggunakan akun 521811 (Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi) sebesar Rp4.374.010.735,00, merupakan pembelian persediaan berupa alat tulis kantor dan perlengkapan kantor lainnya.
- Pembelian persediaan menggunakan akun 521832 (Belanja Barang Persediaan Lainnya) sebesar Rp384.194.174,00, merupakan pembelian persediaan berupa obat-obatan.
- Perolehan lainnya menggunakan akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) sebesar Rp87.119.250,00 merupakan pembelian bahan

mekanikal elektrikal (ME) pada Satker Sekretariat Utama yang kemudian dicatat sebagai persediaan.

- Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp98.990.825,00 merupakan pencatatan perolehan bahan mekanikal elektrikal (ME) sebelum tahun 2022 yang berasal dari perolehan belanja 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) berdasarkan hasil *stock opname* pada Gudang persediaan teknisi dan juga merupakan salah satu bentuk tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK R.I. tahun 2022.

Mutasi Kurang:

Mutasi kurang sebesar Rp5.099.013.402,00 berasal dari:

- Pemakaian Barang konsumsi berupa ATK dan Obat-obatan sebesar Rp5.083.250.300,00;
- Pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan sebesar Rp14.416.012,00.
- Pemakaian barang persediaan berupa Pita Cukai Materai Leges sebesar Rp1.347.090,00.

Persediaan senilai Rp314.577.000,00 pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi usang. Rincian persediaan per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran 4** Laporan Keuangan ini.

C.6 Tanah

Tanah

Tanah yang dimiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama sebesar Rp1.959.546.919.000,00. Tidak terdapat mutasi aset tanah pada periode Tahun 2023.

Tabel C.6.
TANAH PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
Tanah	1.959.546.919.000	1.959.546.919.000
JUMLAH	1.959.546.919.000	1.959.546.919.000

Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Luas Tanah	Nilai
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	398 m ²	2.717.574.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	18.496 m ²	1.944.165.424.000
3	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	9.202 m ²	12.663.921.000
	TOTAL	28.096 m²	1.959.546.919.000

Sertifikat Tanah dan bangunan sebagai bukti kepemilikan seluruhnya dikuasai oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Terdapat sebagian Aset Tanah dan Gedung Bangunan Rumah Negara Golongan III yang berlokasi di Jalan Bima Raya No. 120 Depok sesuai Sertifikat No. 150, yang sampai saat ini masih digunakan oleh pensiunan Kementerian Investasi/BKPM a.n. Bapak Said Ridwan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Luas	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	Tanah Negara Gol III	162 m ²	1.120.416.000	1.120.416.000
2	Bangunan Negara Gol III	50 m ²	99.824.000	59.270.000
	TOTAL		1.220.240.000	1.179.686.000

Atas penempatan aset tersebut, telah dilakukan pendekatan persuasif secara lisan kepada yang bersangkutan untuk dapat segera mengosongkan aset dimaksud. Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, telah dikirimkan surat Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Nomor 646/A.3/B.4/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Pemberitahuan. Kementerian Investasi/BKPM selanjutnya akan melakukan pemantauan dan menempuh tahapan yang diperlukan dalam rangka pengendalian dan pengawasan Barang Milik Negara dimaksud.

C.7 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin

Nilai aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp338.922.462.087,00 dan Rp350.124.592.914,00.

Tabel C.7.1
PERALATAN DAN MESIN PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
Peralatan dan Mesin	338.922.462.087	350.124.592.914
JUMLAH	338.922.462.087	350.124.592.914

Terdapat mutasi nilai peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2022	350.124.592.914
Mutasi tambah:	23.574.902.084
Pembelian	23.574.902.084
Mutasi kurang:	34.777.032.911
Hibah Keluar	5.458.600.000
Penghentian Penggunaan	29.318.432.911
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	338.922.462.087
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	280.952.004.790
Nilai Buku per 31 Desember 2023	57.970.457.297

Mutasi tambah:

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp23.574.902.084,00 terdiri dari Pembelian Peralatan dan Mesin menggunakan akun 532111 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.7.2
MUTASI TAMBAH PERALATAN DAN MESIN TA 2023

(Dalam Rupiah)

Kelompok Aset	Nilai
Sekretariat Utama	
Peralatan Kantor Lainnya (Sound System, CCTV, Access Door, LED Screen, dll)	9.868.354.964
Furniture/Meubelair (Loose Furniture, Brankas, Lemari, Kulkas, dll)	9.039.075.370
Alat Kesehatan (Dental Unit, Kursi Roda, Alat Kimia, Hematologi 5 diff)	773.530.100
Perangkat Pengolah Data (Komputer, Tablet, Laptop, HDD, Video Conference)	2.670.721.650
Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	
Perangkat Pengolah Data (Perangkat Jaringan DD)	1.223.220.000
JUMLAH	23.574.902.084

Mutasi Kurang:

Mutasi kurang sebesar Rp34.777.032.911,00 terdiri dari:

1. Hibah keluar berupa 1 (satu) unit Bus Listrik kepada Universitas Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 138 Tahun 2023 tentang Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa 1 (Satu) unit Bus Listrik, dan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 211 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa 1 (Satu) unit Bus Listrik sebesar Rp5.458.600.000,00.
2. Penghentian penggunaan atas Peralatan dan Mesin sebesar 29.318.432.911,00 yang terdiri dari:
 - a. Penghentian penggunaan atas peralatan dan mesin berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 257 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa 3.354 (Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat) Unit Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.220.255.547,00.
 - b. Penghentian penggunaan atas peralatan dan mesin hasil koreksi Tim Pemeriksa BPK R.I. sebesar Rp17.098.177.364,00 yang terdiri dari:
 - 1) Penghentian penggunaan akibat kondisi barang rusak berat sesuai hasil pemeriksaan fisik sebesar Rp10.630.295.294,00. Atas aset peralatan dan mesin dimaksud akan diusulkan penghapusannya di tahun 2024.
 - 2) Penghentian penggunaan barang non rusak berat sesuai hasil pemeriksaan fisik di mana aset tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan sebesar Rp6.467.882.070,00. Atas aset dimaksud Kementerian Investasi/BKPM akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut di tahun 2024 untuk kemudian menetapkan apakah akan digunakan kembali atau akan diusulkan untuk dihapuskan.

Rincian atas aset peralatan dan mesin sebesar Rp17.098.177.364,00 dapat dilihat dalam **Lampiran 5** Laporan Keuangan ini.

Pada tahun 2023 terdapat aset Peralatan dan Mesin milik Kementerian Investasi/BKPM yang digunakan oleh Pihak Lain dengan incian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Dinas berupa Minibus NUP 43 Merek Toyota Avanza senilai Rp99.800.000,00, yang saat ini digunakan sebagai kendaraan operasional di BP Batam;
- 4 (empat) unit Bus Listrik dengan NUP 2, 3, 4, dan 6 Merek Foxtron senilai Rp21.834.400.000,00, di mana 3 (tiga) unit bus saat ini dipinjamkan kepada PT Kallista untuk uji coba kendaraan listrik bagi masyarakat di Kota Medan tanpa dipungut biaya, dalam rangka mendukung program Pemerintah Indonesia untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai (*electric vehicle*). Sementara 1 (unit) Bus Listrik dengan NUP 2 masih dititipkan di pool bis milik PT. Energi Makmur Buana di Jl. Perintis Kemerdekaan DKI. Jakarta.

Atas kendaraan dimaksud Kementerian Investasi/BKPM akan melaksanakan pemantauan dan menempuh tahapan yang diperlukan dalam rangka pengendalian dan pengawasan Barang Milik Negara dimaksud.

Rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan Akumulasi penyusutannya disajikan pada **Lampiran 5** Laporan Keuangan ini.

C.8 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp286.973.823.275,00 dan Rp279.174.857.894,00.

Tabel C.8.1
GEDUNG DAN BANGUNAN PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
Gedung dan Bangunan	286.973.823.275	279.174.857.894
JUMLAH	286.973.823.275	279.174.857.894

Terdapat mutasi nilai gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2022	279.174.857.894
Mutasi tambah:	7.891.440.961
Pembelian/Renovasi	7.891.440.961
Mutasi Kurang:	92.475.580

Uraian	Jumlah
Reklasifikasi keluar	92.475.580
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	286.973.823.275
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	77.114.874.851
Nilai Buku per 31 Desember 2023	209.858.948.424

Mutasi tambah:

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.891.440.961,00 terdiri dari Pembelian/Renovasi Gedung dan Bangunan akun 533121 disajikan sebagai berikut:

Tabel C.8.2
MUTASI TAMBAH GEDUNG DAN BANGUNAN T.A. 2023

(Dalam Rupiah)

No	Kelompok Aset	Nilai
1	Pekerjaan <i>Relayout</i> Ruang Biro Perencanaan dan Program Anggaran	354.316.440
2	Pekerjaan <i>Relayout</i> Ruang Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM	193.497.000
3	Pekerjaan <i>Relayout</i> Ruang Deputy Bidang Hillirisasi Investasi Strategis	198.168.685
4	Pekerjaan <i>Relayout</i> Ruang Deputy Bidang Pengembangan Iklim PM	390.831.000
5	Pekerjaan <i>Relayout</i> Ruang Pusat Pendidikan dan Pelatihan	351.995.430
6	Pekerjaan <i>Relayout</i> Ruang Deputy Bidang Teknologi Informasi PM	396.309.000
7	Pekerjaan <i>Relayout</i> Bagian Kepegawaian	153.211.000
8	Pekerjaan <i>Relayout</i> Ruang Staf Menteri	789.151.415
9	Pekerjaan <i>Relayout</i> Lantai 4 Gd. Suhartoyo	93.890.000
10	Pekerjaan <i>Relayout</i> Lantai 5 Gd. Suhartoyo	95.000.000
11	Pekerjaan <i>Relayout</i> Lantai 7 Gd. Suhartoyo	1.277.921.800
12	Pekerjaan <i>Relayout</i> Lantai 8 Gd. Suhartoyo	1.396.490.850
13	Pekerjaan Renovasi Toilet	385.835.196
14	Pekerjaan Renovasi Pos Penjagaan Gatot Subroto	126.798.900
15	Pekerjaan Renovasi Area Selasar	338.652.340
16	Pekerjaan Renovasi Ruang Rapat dan Arsip	378.749.450
17	Pekerjaan Renovasi Area Pelantikan Lantai 3 Gedung Ismail Saleh	52.000.000
18	Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Pejabat Ahli Utama dan Fungsional Utama	792.750.000
19	Pekerjaan <i>Relayout</i> Hunian Kenanga dan Dahlia Kampus Investasi	125.872.455
JUMLAH		7.891.440.961

Mutasi kurang:

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp92.475.580,00 berasal dari reklasifikasi keluar pada Satker Sekretariat Utama berupa koreksi atas nilai perolehan Gedung dan bangunan yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi pada pekerjaan *Relayout* Hunian Kenanga 3, 4, 5, dan Dahlia 2 Kampus Investasi TA. 2023.

Terdapat sebagai aset berupa Gedung Bangunan Rumah Negara Golongan III seluas 50 m² senilai Rp99.824.000,00 yang bertempat di Jl. Bima Raya No. 120 Depok yang masih ditempati pensiunan Kementerian Investasi/BKPM sebagaimana telah dijelaskan dalam pengungkapan atas Tanah pada poin **C.6 Tanah** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada **Lampiran 5** Laporan Keuangan ini.

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama masing-masing sebesar Rp9.022.115.183,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang pada Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama periode Tahun 2023.

Tabel C.9.
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.022.115.183	9.022.115.183
JUMLAH	9.022.115.183	9.022.115.183

Rincian nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	QTY	Nilai
1	Jalan	6.211 m ²	1.908.177.000
2	Irigasi	12 Unit	2.250.774.000
3	Jaringan	4 Unit	4.863.164.183
	TOTAL		9.022.115.183

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada **Lampiran 5** Laporan Keuangan ini.

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.447.207.849,00 dan Rp1.060.422.649,00.

Tabel C.10.
ASET TETAP LAINNYA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
Aset Tetap Lainnya	1.447.207.849	1.060.422.649
JUMLAH	1.447.207.849	1.060.422.649

Terdapat mutasi nilai Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2022	1.060.422.649
Mutasi tambah:	386.785.200
Pembelian	386.785.200
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	1.447.207.849
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	544.148.550
Nilai Buku per 31 Desember 2023	903.059.299

Mutasi Tambah sebesar Rp386.785.200,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa:

1. Pembelian Ornamen Kaligrafi untuk Mimbar dan Dinding Masjid Al-Ihsan Kementerian Investasi/KPM sebesar Rp233.250.000,00.
2. Pembelian Lukisan Dinding sebesar Rp153.535.200,00.

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada **Lampiran 5** Laporan Keuangan ini.

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

**Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(363.259.337.377,00) dan Rp(353.740.377.580,00).

Tabel C.11.
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(363.259.337.377)	(353.740.377.580)
JUMLAH	(363.259.337.377)	(353.740.377.580)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.959.546.919.000	-	1.959.546.919.000
Peralatan dan Mesin	338.922.462.087	(280.952.004.790)	57.970.457.297
Gedung dan Bangunan	286.973.823.275	(77.114.874.851)	209.858.948.424
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.022.115.183	(4.648.309.186)	4.373.805.997
Aset Tetap Lainnya	1.447.207.849	(544.148.550)	903.059.299
JUMLAH	2.595.912.527.394	(363.259.337.377)	2.232.653.190.017

Selanjutnya Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Periode Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Beban Penyusutan	Koreksi Penyusutan	Saldo
Peralatan dan Mesin	284.779.815.606	26.269.597.095	(30.097.407.911)	280.952.004.790
Gedung dan Bangunan	64.018.085.343	13.092.972.725	3.816.783	77.114.874.851
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.447.914.331	200.394.855	-	4.648.309.186
Aset Tetap Lainnya	494.562.300	49.586.250	-	544.148.550
JUMLAH	353.740.377.580	39.612.550.925	(30.093.591.128)	363.259.337.377

Terdapat koreksi nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp30.093.591.128,00 yang disebabkan oleh:

1. Koreksi nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp30.097.407.911,00 berasal dari:
 - a. Koreksi kurang sebesar Rp12.999.230.547,00 akibat penghapusan Aset Peralatan dan Mesin berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 257 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa 3.354 (Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat), dan hibah keluar atas 1 (satu) unit Bus Listrik sebesar Rp779.800.000,00 sesuai Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 211 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa 1 (Satu) unit Bus Listrik.

- b. Koreksi kurang sebesar Rp17.098.177.364,00 berasal dari reklasifikasi pencatatan akumulasi aset peralatan dan mesin ke akumulasi aset lain-lain berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah baik karena kondisi rusak berat maupun non rusak berat sesuai hasil pemeriksaan fisik Tim Pemeriksa BPK R.I.
2. Koreksi tambah nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.816.783,00 berasal dari koreksi pencatatan pekerjaan *Relayout* Hunian Kenanga dan Dahlia Kampus Investasi Kementerian Investasi/BKPM TA 2023 yang semula dicatat pada Bangunan Gedung Pendidikan Permanen kemudian dikoreksi menjadi Asrama Permanen. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa BPK dilakukan koreksi nilai kembali dikarenakan atas perolehan aset Gedung dan bangunan yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi pada pekerjaan *Relayout* Hunian Kenanga 3, 4, 5, dan Dahlia 2 Kampus Investasi TA 2023.

C.12 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp102.047.984.612,00 dan Rp167.515.355.087,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel C.12.
ASET TAK BERWUJUD PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
Aset Tak Berwujud	102.047.984.612	167.515.355.087
JUMLAH	102.047.984.612	167.515.355.087

Terdapat mutasi nilai Aset Tak Berwujud pada periode Tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2022	167.515.355.007
Mutasi Tambah:	29.645.762.574
Pembelian	27.739.045.200
Perolehan ATB dari akun S2	1.906.717.374
Mutasi kurang:	95.113.133.049
Penghapusan	94.053.462.849
Reklas ke ATL	386.785.200
Reklas ke ATB yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	672.885.000
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	102.047.984.612
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	58.983.644.931
Nilai Buku per 31 Desember 2023	43.064.339.681

Mutasi Tambah

Mutasi tambah sebesar Rp29.645.762.574,00 terdiri dari:

1. Pembelian Aset Tak Berwujud selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.739.045.200,00 berasal dari realisasi belanja modal lainnya (536111) berupa:
 - A. Pekerjaan Pemeliharaan dan Migrasi Sistem Mitrain sebesar Rp99.678.000,00 pada Satker Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
 - B. Pekerjaan Instrumen dan Database Sistem Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.555.000.000,00 pada Satker Deputy Bidang Kerjasama Penanaman Modal.
 - C. Perolehan ATB sebesar Rp25.697.582.000,00 pada Satker Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal berupa:
 - a. Pengembangan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko TA 2023 sebesar Rp24.871.328.000,00;

- b. Pengembangan Aplikasi *Business Intelligence* Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp726.654.000,00;
 - c. Jasa Konsultasi Pengembangan Sistem Pejabat Pengelolaan Informasi dan Pengelolaan Dokumentasi (PPID) Kementerian Investasi/BKPM Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp99.600.000,00.
 - D. Pengadaan Ornamen Kaligrafi dan Lukisan sebesar Rp386.785.200,00 pada Satker Sekretariat Utama yang kemudian direklasifikasikan ke Aset Tetap Lainnya.
2. Perolehan ATB dari akun Belanja Barang sebesar Rp1.906.717.374,00 terdiri dari:
- a. Perolehan ATB dari Belanja Jasa Konsultan (522131) pada Satker Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berupa Aplikasi Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus (SIDAK) sebesar Rp567.298.800,00.
 - b. Perolehan ATB dari Belanja Jasa Lainnya (522191) pada Satker Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal berupa Lisensi DNS Security dengan masa manfaat hingga tahun 2026 sebesar Rp1.219.890.000,00.
 - c. Perolehan ATB dari Belanja Sewa (522141) pada Satker Sekretariat Utama berupa pembayaran Lisensi SSL Certificate (*bkpm.go.id*, *oss.go.id*, dan *investindonesia.go.id*) dengan masa manfaat hingga tahun 2025 sebesar Rp119.528.574,00.

Mutasi Kurang

Mutasi kurang sebesar Rp95.113.133.049,00 berasal dari:

- 1. Penghapusan 60 (Enam Puluh) unit Aset Tak Berwujud senilai Rp94.053.462.849,00 berdasarkan:
 - A. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 82 Tahun 2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Berupa 14 (Empat Belas) Unit Aset Tak Berwujud senilai Rp408.842.000,00.
 - B. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 83 Tahun 2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal



Berupa 36 (Tiga Puluh Enam) Unit Aset Tak Berwujud senilai Rp22.238.072.520,00.

- C. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 84 Tahun 2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Berupa 1 (Satu) Unit Aset Tak Berwujud senilai Rp5.186.640.000,00.
 - D. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 95 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Berupa 1 (Satu) Unit Aset Tak Berwujud senilai Rp54.184.278.065,00.
 - E. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 245 Tahun 2023 tanggal 7 September 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Berupa 4 (Empat) Unit Aset Tak Berwujud senilai Rp268.620.000,00.
 - F. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 246 Tahun 2023 tanggal 7 September 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Berupa 1 (Satu) Unit Aset Tak Berwujud senilai Rp9.121.455.264,00.
 - G. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 251 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Berupa 3 (Tiga) Unit Aset Tak Berwujud senilai Rp2.645.555.000,00.
- 2. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp386.785.200,00 berupa Pengadaan Ornamen Kaligrafi dan Lukisan pada Satker Sekretariat Utama.
 - 3. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal sebesar Rp672.885.000,00 berupa Sistem Helpdesk Layanan Berusaha (NUP 12) senilai Rp290.400.000,00 dan Sistem Penyampaian Data Elektronik (NUP 13) senilai Rp382.485.000,00.

Daftar rincian Aset Tak Berwujud yang dihapuskan disajikan dalam **Lampiran 6** Laporan Keuangan ini.

C.13 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing masing sebesar Rp79.696.684.428,00 dan Rp0,00.

Tabel C.13.
DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	79.696.684.428	-
JUMLAH	79.696.684.428	-

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (DYDP) merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Adapun Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Tahun 2023 merupakan dana pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) atas Kontrak pekerjaan dengan tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 21 s.d 31 Desember 2023 yang sudah membebani anggaran namun belum dibayarkan kepada penyedia yang berhak. Rincian DYDP disajikan dalam daftar berikut:

(Dalam Rupiah)

SATUAN KERJA	JUMLAH
Sekretariat Utama Kementerian Investasi/BKPM	12.607.690.118
Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	3.586.414.278
Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	20.735.312.638
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	16.440.387.157
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	888.444.000
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	8.131.994.957
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	17.305.441.280
JUMLAH	79.696.684.428

Rincian Daftar Dana yang Dibatasi Penggunaannya disajikan dalam **Lampiran 7** Laporan Keuangan ini.

Aset Lain Lain

C.14 Aset Lain - Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp24.239.552.857,00 dan Rp6.410.421.679,00.

Tabel C.14.
ASET LAIN-LAIN PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
Aset Lain-lain	24.239.552.857	6.410.421.679
JUMLAH	24.239.552.857	6.410.421.679

Terdapat mutasi nilai Aset Lain-Lain pada periode Tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2022	6.410.421.679
Mutasi Tambah:	17.829.131.178
Penambahan Deposit sewa di BPC Singapura dan Inggris	58.068.814
Reklas masuk dari Aset Tetap ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	17.098.177.364
Reklas masuk dari ATB ke ATB tidak digunakan dalam operasional pemerintah	672.885.000
Mutasi kurang:	0
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	24.239.552.857

Aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.239.552.857,00 terdiri atas:

1. Deposit sewa ruang kantor pada kantor perwakilan BKPM di Luar Negeri, *Indonesia Investment Promotion Center (IIPC)*, yang masih berada pada pemilik Gedung.

Tabel C.14.1
DEPOSIT SEWA KANTOR IIPC PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No	Pemilik Gedung (Lessor)	IIPC (Lessee)	Nilai Deposit	Jumlah
1	Fukoku Mutual Seimei Insurance Company	Tokyo, Jepang	JPY 15.460.170,00	2.109.871.817
2	Suntec Real Estate Investment Trust	Singapura	SGD 38.897,25	415.213.946
3	Servcorp Administration Services Ltd	Abu Dhabi, UEA	AED 94.840	364.577.289
4	Sherwood 370 Lexington LLC (d/h)	New York, USA	USD 26.693,23	376.508.143
5	Landmark Space Limited	London, Inggris	GBP 28.400,00	551.059.400
6	Perpetual Trustee Company Limited	Sydney, Australia	AUD 139.472,18	1.506.692.921
7	SIFC Tower One Development YH	Seoul, Korea Selatan	KRW 88.281.294,00	1.144.566.977
			TOTAL	6.468.490.493

Deposit sewa akan dikembalikan ke Kas Negara pada saat perjanjian sewa berakhir dan/tidak diperpanjang akibat kantor perwakilan mengalami perpindahan atau penutupan.

2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp17.098.177.364,00 berasal dari pencatatan atas aset yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional kantor, baik karena kondisi rusak berat maupun non rusak berat berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Tim Pemeriksa BPK RI.

Tabel C.14.2
RINCIAN ASSET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH

(Dalam Rupiah)

No	Satuan Kerja	Jenis Aset	Jumlah
1	Sekretariat Utama	PM	16.957.465.864
2	Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal	PM	84.300.000
3	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	PM	41.800.000
4	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	PM	14.610.500
		TOTAL	17.098.177.364

Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan disajikan dalam **Lampiran 8** Laporan Keuangan ini.

3. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp672.885.000,00 berasal dari pencatatan penghentian aset atas *Software* berupa Sistem *Helpdesk* Layanan Berusaha (NUP 12) sebesar Rp290.400.000,00 dan Sistem Penyampaian Data Elektronik (NUP 13)

sebesar Rp382.485.000,00 yang sudah tidak digunakan lagi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Tim Pemeriksa BPK R.I. pada Satker Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

C.15 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(76.081.722.295,00) dan Rp(114.121.352.273,00).

Tabel C.15.
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(76.081.722.295)	(114.121.352.273)
JUMLAH	(76.081.722.295)	(114.121.352.273)

Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi pada Periode Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Beban Penyusutan/ Amortisasi	Koreksi Penyusutan/ Amortisasi	Saldo
Akm. Peny. Aset Tetap yang tidak digunakan	-	-	17.098.177.364	17.098.177.364
Akumulasi Amortisasi Software	114.121.352.273	23.351.983.926	(79.306.505.108)	58.166.831.091
Akumulasi Amortisasi Lisensi	-	133.941.858	9.886.982	143.828.840
Akm. Peny. Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	-	-	672.885.000	672.885.000
JUMLAH	114.121.352.273	23.485.925.784	61.525.555.762	76.081.722.295

Terdapat koreksi Penyusutan/Amortisasi sebesar Rp61.525.555.762,00 dengan penjelasan sebagai berikut;

1. Koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp17.098.177.364,00 berasal dari koreksi pencatatan atas akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dikoreksi menjadi aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah.
2. Koreksi kurang nilai Akumulasi Amortisasi Software sebesar Rp79.306.505.108,00 akibat penghentian software dari penggunaan.

3. Koreksi tambah nilai Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp9.886.982,00 merupakan koreksi nilai Akumulasi Penyusutan atas Lisensi perolehan tahun 2022 yang baru dicatat pada tahun 2023.
4. Koreksi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp672.885.000,00 berasal dari koreksi nilai amortisasi atas penghentian penggunaan software yang kemudian dicatat sebagai Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah.

C.16 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp81.012.548.924,00 dan Rp1.506.970.917,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Tabel C.16.
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
Utang Kepada Pihak Ketiga	81.012.548.924	1.506.970.917
JUMLAH	81.012.548.924	1.506.970.917

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga disajikan dalam daftar berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	31-12-2023	31-12-2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	366.969.289	74.454.586
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	814.722.587	846.382.867
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	79.830.857.048	586.133.464
Jumlah	81.012.548.924	1.506.970.917

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp366.969.289,00 berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa kekurangan gaji dan tunjangan pegawai tahun 2023 yang baru diajukan pembayarannya di awal tahun 2024.

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp814.722.587,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa tagihan Listrik, Telepon, dan Air pemakaian bulan Desember 2023 yang baru ditagihkan dan dibayarkan di awal tahun 2024.

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp79.830.857.048,00 berasal dari:

- Honarium tetap bulan Desember 2023 sebesar Rp497.279.857,00 yang masih berada pada rekening Bendahara Pengeluaran sampai tanggal pelaporan dan baru dibayarkan kepada pegawai di awal tahun 2024.
- Biaya langganan koran pada kantor IIPC Sydney sebesar Rp1.468.587,00 yang masih berada pada rekening kantor IIPC sampai tanggal pelaporan dan belum dibayarkan kepada penyedia yang berhak.
- Utang kepada Pihak Ketiga lainnya sebesar Rp79.332.108.604,00 berasal dari pekerjaan kontraktual TA 2023 yang sudah selesai dilaksanakan pekerjaannya sampai dengan 31 Desember 2023 namun pembayaran kepada pihak Penyedia dilakukan menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) dan baru dibayarkan di awal tahun 2024 sesuai rincian pada **Lampiran 9**.

C.17 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan
Diterima Di muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.770.863.838,00 dan Rp1.200.645.703,00. Pendapatan Diterima Di muka merupakan pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Tabel C.17.
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
Pendapatan Diterima Di muka	1.770.863.838	1.200.645.703
JUMLAH	1.770.863.838	1.200.645.703

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 seluruhnya berasal dari Pendapatan Sewa pada Satker Sekretariat Utama berupa Pendapatan Sewa Ruang Kantor/Lahan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah		Penjelasan
	31 Des 2023	31 Des 2022	
PT. BRI (Persero), Tbk.	229.093.011	54.857.850	Sewa Ruang Kantor
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	596.716.444	146.823.555	Sewa Ruang Kantor
PT. Telkom	483.381.000	644.508.000	Sewa Lahan
Koperasi Karyawan "Pecanderaan"	271.168.383	11.747.298	Sewa Ruang Kantor
PT. Bank Negara Indonesia, Tbk	190.505.000	342.909.000	Sewa Ruang Kantor
Total	1.770.863.838	1.200.645.703	

C.18 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp678.341.646,00 dan Rp38.258.828,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian Uang Muka dari KPPN tiap satuan kerja disajikan dalam daftar berikut:

(Dalam Rupiah)

Satuan Kerja	Jumlah
Sekretariat Utama	266.998.341
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	130.000
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal	90.803.485
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	84.836.683
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	231.720.205
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	3.852.932
Total	678.341.646

C.19 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka
Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.281.807,00 dan Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya pada tanggal pelaporan seluruhnya berasal dari utang pajak yang belum disetor ke Kas negara oleh Bendahara Pengeluaran pada Satker DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.

Atas Utang Jangka Pendek ini sampai dengan tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara. Kementerian Investasi/BKPM akan melakukan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk penyelesaian kewajiban ini di tahun 2024.

C.20 Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.288.895.571.531,00 dan Rp2.311.419.950.932,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan
PNBP

Jumlah Pendapatan pada Kementerian Investasi/BKPM untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp675.091.049,00 dan Rp643.071.791,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.1.
PERBANDINGAN RINCIAN PENDAPATAN T.A. 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022	% naik/ (turun)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	659.446.865	634.731.333	3,89
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	433.932	3.386.374	(87,19)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	10.584.134	1.474.545	617,79
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	4.626.118	3.479.539	32,95
Jumlah	675.091.049	643.071.791	4,98%

Bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 terjadi peningkatan nilai pendapatan pada tahun 2023 sebesar 4,98 persen yang berasal dari peningkatan penerimaan pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan dan penerimaan dari pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut.

- A. Pengakuan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp659.446.865,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp85.389.839,00.
 - 2) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebesar Rp221.413.112,00.
 - 3) PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp161.127.000,00.
 - 4) Koperasi "Pecanderaan" sebesar Rp39.112.914,00.
 - 5) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp152.404.000,00.
- B. Pengakuan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Tahun 2023 sebesar Rp433.932,00 berasal dari:
 - 1) Satker Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal sebesar Rp432.509,00 berupa Bunga Bank pada rekening IIPC.
 - 2) Satker Sekretariat Utama berupa Bunga Bank atas Rekening Pengeluaran Lainnya senilai Rp1.423,00.
- C. Pengakuan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah TA 2023 sebesar Rp10.584.134,00 berasal dari:

- 1) Satker Sekretariat Utama sebesar Rp9.464.535,00
 - 2) Satker Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal sebesar Rp1.119.599,00.
- D. Pengakuan Pendapatan Anggaran Lain-lain TA 2023 sebesar Rp4.626.118,00 berasal dari:
- a) Satker Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal sebesar Rp3.989.246,00.
 - b) Satker Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal sebesar Rp634.872,00.
 - c) Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp2.000,00.

D.2 Beban Pegawai

Beban
Pegawai

Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp142.126.401.683,00 dan Rp137.228.785.604,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.2.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN PEGAWAI T.A. 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022	% naik/(turun)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	77.664.020.598	73.627.137.424	5,48
Beban Gaji dan Tunjangan Non PNS	2.098.787.500	2.098.787.500	0,00
Beban Honorarium	6.241.512.506	6.234.284.084	0,12
Beban Lembur	66.548.900	52.813.000	26,01
Beban Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	56.055.532.179	55.215.763.596	1,52
Jumlah	142.126.401.683	137.228.785.604	3,57%

Bila dibandingkan dengan besaran Belanja Pegawai pada LRA, terdapat koreksi melalui Jurnal Penyesuaian senilai Rp209.097.266,00 yang terjadi karena perbedaan basis akuntansi atas pelaporan LO yang berbasis akrual, dengan LRA yang berbasis kas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.2.1
RINCIAN SELISIH BELANJA DAN BEBAN PEGAWAI T.A. 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian (Belanja/Beban)	LRA (Netto)	LO	PENYESUAIAN
Gaji dan Tunjangan PNS	77.446.562.090	77.664.020.598	217.458.508
Gaji dan Tunjangan Non PNS	2.098.787.500	2.098.787.500	-
Honorarium	6.337.872.110	6.241.512.506	(96.359.604)
Lembur	66.548.900	66.548.900	-
Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	55.967.533.817	56.055.532.179	87.998.362
Jumlah	141.917.304.417	142.126.401.683	209.097.266

D.3 Beban Persediaan

Beban
Persediaan

Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.083.250.300,00 dan Rp5.907.040.920,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.3.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN T.A. 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022	% naik/(turun)
Beban Persediaan Konsumsi	5.083.250.300	5.907.040.920	(13,95)
Jumlah	5.083.250.300	5.907.040.920	(13,95)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban
Barang dan
Jasa

Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp664.987.750.735,00 dan Rp833.833.086.007,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.4.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN BARANG DAN JASA T.A. 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022	% naik/(turun)
Beban Barang Operasional	43.096.620.499	38.470.639.430	12,02
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	899.177.219	2.758.927.790	(67,41)
Beban Barang Non Operasional	61.430.640.333	47.419.731.382	29,55
Beban Langganan Daya dan Jasa	11.084.626.755	9.763.796.726	13,53
Beban Jasa Konsultan	134.879.575.765	420.321.113.811	(67,91)
Beban Sewa	92.381.515.326	76.959.067.771	20,04
Beban Jasa Profesi	10.542.876.501	18.606.428.000	(43,34)
Beban Jasa Lainnya	310.471.340.337	218.164.048.046	42,31
Beban Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19	201.378.000	1.369.333.051	(85,29)
Jumlah	664.987.750.735	833.833.086.007	(20,25)

Bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 terjadi penurunan nilai beban sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 20,25 persen. Hal ini terjadi karena adanya penurunan pada akun Beban Jasa Konsultan, Beban Barang dan Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19, dan Beban Jasa Profesi.

D.5 Beban Pemeliharaan

Belanja
Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.718.756.735,00 dan Rp15.816.280.522,00, dengan rincian:

Tabel D.5.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN T.A. 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022	% naik/(turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.023.188.825	8.809.610.577	13,78
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	358.314.213	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.442.048.036	5.840.101.669	10,31
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	815.810.249	1.112.984.308	(26,70)
Beban Pemeliharaan Lainnya	64.979.400	49.950.000	30,09
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	14.416.012	3.633.968	296,70
Jumlah	17.718.756.735	15.816.280.522	12,03

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp203.840.036.292,00 dan Rp186.729.722.088,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.6.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN PERJALANAN DINAS T.A. 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022	% naik/(turun)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	121.677.863.352	141.118.015.577	(13,63)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	81.962.172.940	45.611.706.511	79,70
Jumlah	203.840.036.292	186.729.722.088	9,16

Bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022, Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri mengalami penurunan sebesar 13,63 persen. Sebaliknya, Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri mengalami kenaikan signifikan, yaitu sebesar 79,70 persen. Secara keseluruhan, pada TA 2023 terdapat kenaikan pada Beban Perjalanan Dinas sebesar 9,16 persen jika dibandingkan dengan TA 2022.

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban
Barang untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.347.090,00 dan Rp5.746.361.520, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.7.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
T.A. 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022	% naik/(turun)
Beban Persediaan pita cukai, materai dan legas	1.347.090	2.048.000	(34,22)
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	0	5.744.313.520	(100,00)
Jumlah	1.347.090	5.746.361.520	(99,98)

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp63.098.476.709,00 dan Rp60.213.193.832,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.8.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
T.A. 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022	% naik/(turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	26.269.597.095	27.710.906.496	(5,20)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.092.972.725	12.209.445.222	7,24
Beban Penyusutan Jaringan	76.597.362	76.597.362	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	123.797.493	123.797.492	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	49.586.250	49.586.250	0,00
Beban Amortisasi Software	23.351.983.926	20.042.861.010	16,51
Beban Amortisasi Lisensi	133.941.858	0	0,00
TOTAL	63.098.476.709	60.213.193.832	4,79

D.9 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan
Non
Operasional

Rincian Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.9.

PERBANDINGAN RINCIAN KEGIATAN NON OPERASIONAL TA 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA. 2023	TA. 2022	% naik/(turun)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	147.889.999	0	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(19.662.459.303)	0	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	66.301.532	25.397.742	161,05
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	8.219.984.991	5.164.786.632	59,15
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	34.585.897	113.414.709	(69,50)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	16.742.508	(100,00)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	(29.635.464)	100,00
Beban Lain-lain	(1.603)	(24.677.479)	99,99
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	(11.193.698.487)	5.266.028.648	(312,56)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.311.419.950.932,00 dan Rp2.306.396.990.137,00.

E.2 Surplus/(Defisit) LO

Surplus/Defisit LO Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(1.107.374.626.982,00) dan Rp(1.239.565.370.054,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan Pos Luar Biasa.

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Transaksi Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sama sebesar Rp0,00.

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp98.990.825,00 dan Rp12.829.200,00. Koreksi nilai persediaan per tanggal pelaporan sebesar Rp98.990.825,00 berasal dari koreksi pencatatan hasil inventarisasi di tahun 2023 atas persediaan Mekanikal Elektrikal (ME) perolehan sampai dengan tahun 2022 yang masih terdapat dalam gudang teknisi namun belum tercatat sebagai persediaan dan selanjutnya dicatat sebagai persediaan ME di tahun 2023.

E.5 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian kembali Aset Tetap yang dilaksanakan pada Semester II tahun 2018 dan hasil perbaikan pada tahun 2019. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama masing-masing sebesar Rp0,00.

E.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(433.022.763,00) dan

Rp(1.456.999.752,00). Koreksi ini berasal dari Transaksi Koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2023 sebesar Rp(433.022.763,00) disebabkan oleh:

1. Koreksi pencatatan sebesar Rp(437.008.438,00) akibat koreksi Nomor Urut Pendaftaran (NUP) atas Aset Tak Berwujud berupa Pengembangan Software Website BKPM Tahun 2022 yang semula dicatat kedalam NUP 5 (lima) Sistem Kepegawaian selanjutnya dikoreksi menjadi NUP 3 (tiga) Website Kementerian Investasi/BKPM.
2. Koreksi pencatatan sebesar Rp(3.816.783,00) akibat koreksi pencatatan aset Gedung dan Bangunan atas pekerjaan *Relayout* Hunian Kenanga 3, 4, 5, dan Dahlia 2 Kampus Investasi TA. 2023 yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi.
3. Koreksi pencatatan sebesar Rp7.802.458,00 akibat koreksi pencatatan atas Lisensi SSL *Certificate* (*bkpm.go.id*, *oss.go.id*, dan *investindonesia.go.id*) perolehan tahun 2022 yang baru dicatat sebagai aset pada tahun 2023.

E.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama masing-masing sebesar Rp37.261.500,00 dan Rp0,00. Koreksi lain-lain ini berasal dari koreksi pencatatan atas tagihan belanja barang tahun 2022 yang ditagihkan di tahun 2023 melalui pengajuan mekanisme tunggakan pada Satker DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan.

E.8 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.085.147.018.019,00 dan Rp1.246.032.501.401,00. Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN. Rincian transaksi antar entitas pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.094.951.654.261
Diterima dari Entitas Lain	(9.804.636.242)
JUMLAH	1.085.147.018.019

E.8.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima Dari Entitas Lain/Ditagihkan Ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DKEL sebesar Rp1.094.951.654.261,00 sedangkan DDEL sebesar Rp(9.804.636.242,00).

Ekuitas Akhir**E.9 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.288.895.571.531,00 dan Rp2.311.419.950.932,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Catatan Penting Lainnya atas Laporan Realisasi Anggaran

a. Capaian Output Strategis K/L

Selama periode Tahun Anggaran 2023 *output* strategis yang telah dicapai oleh Kementerian Investasi/BKPM adalah sebagai berikut:

- 1) Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal TA. 2023 sebesar Rp1.418,9 Triliun atau mencapai 120 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.099,8 Triliun. Nilai realisasi penanaman modal berasal dari perolehan segala bentuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di luar investasi minyak dan gas (migas), perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, usaha mikro dan kecil.
- 2) Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder TA. 2023 sebesar Rp596,3 Triliun atau mencapai 120 persen dari target sebesar Rp483,9 Triliun. Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder merupakan realisasi penanaman modal sektor sekunder yang diraih baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di luar migas, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, usaha mikro dan usaha kecil. Adapun ruang lingkup sektor sekunder meliputi:
 1. Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya;
 2. Industri Makanan;
 3. Industri Kimia dan Farmasi;
 4. Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi lain;
 5. Industri Kertas dan Percetakan
 6. Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam
 7. Industri Tekstil
 8. Industri Karet dan Plastik
 9. Industri Mineral Non-Logam
 10. Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki;

11. Industri Kayu; dan
 12. Industri Lainnya
- 3) Capaian Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (Di Luar Jawa) TA. 2023 sebesar 51,5 persen dari target sebesar 50,6 persen. Target Sebaran Penanaman Modal Berkualitas ditetapkan dalam rangka mengejar pemerataan ekonomi khususnya untuk wilayah di luar Jawa, Kementerian Investasi/BKPM berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas investasi untuk mencapai pemerataan yang ditujukan terhadap wilayah-wilayah di luar Jawa.
 - 4) Capaian Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM TA. 2023 sebesar 47,6 persen dari target sebesar 51,9 persen. Capaian ini diarahkan untuk mengukur tingkat kemampuan para penanam modal dalam negeri, dalam hal ini biasa diidentikkan dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pelibatan UMKM dalam proses investasi merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia.
 - 5) Capaian Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) TA. 2023 adalah peringkat 34 dari target peringkat 45. Peringkat Kemudahan Berusaha sejak tahun 2022 mengacu pada *World Competitiveness Yearbook* yang diterbitkan oleh *Institute for Management Development* (IMD). Berdasarkan hasil pemeringkatan yang telah dikeluarkan, indeks daya saing kemudahan berusaha Indonesia mengalami peningkatan yang semula berada di peringkat 44 di tahun 2022, menjadi peringkat 34 di tahun 2023 dari total 64 negara di seluruh dunia.
 - 6) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM TA. 2023 adalah sebesar 71,91 atau masuk dalam predikat Baik dari target nilai sebesar 80. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM adalah tingkat proses pelaksanaan RB lingkup Kementerian Investasi/BKPM secara keseluruhan dan didukung dengan penilaian secara rinci pada level unit kerja Eselon I. Kementerian Investasi/BKPM terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
 - 7) Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM TA. 2022 yang dikeluarkan di Tahun 2023 memperoleh opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini atas Laporan Keuangan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

b. Capaian Output per Fungsi APBN

Pelaksanaan APBN pada Kementerian Investasi/BKPM diklasifikasikan ke dalam 1 fungsi yaitu fungsi Ekonomi (04). Capaian *output* utama per Fungsi APBN dijabarkan dalam **Lampiran 10** laporan keuangan ini.

c. Capaian Output per Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pagu anggaran PN yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM adalah sebesar Rp442.534.472.000,00 dengan total realisasi sebesar Rp436.658.754.736,00, sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 11** laporan keuangan ini.

d. Pelaksanaan Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA)

Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran, merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

Mekanisme pelaksanaan RPATA pada Kementerian Investasi/BKPM tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



1) SPM Penampungan

SPM Penampungan merupakan pengajuan tagihan pembayaran atas pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, dimana dana tersebut akan masuk ke dalam rekening penampungan RPL-BUN. Terdapat 46 pengajuan SPM Penampungan pada 7 Satuan Kerja dengan total sebesar Rp84.091.684.428,00 sebagaimana rincian berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Sekretariat Utama/Sekretariat Kementerian	12.607.690.118
2	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	3.586.414.278
3	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	20.735.312.638
4	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	20.835.387.157
5	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	888.444.000
6	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	8.131.994.957
7	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	17.306.441.280
Total		84.091.684.428

2) SPM Pembayaran Tahun 2023 dan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Terdapat 1 pekerjaan yang telah selesai 100% dan dibayarkan dari rekening penampungan ke rekening pihak ketiga pada TA 2023 sebesar Rp4.395.000.000,00 pada Satuan Kerja Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal. Atas pembayaran tersebut, masih terdapat 45 pekerjaan yang belum selesai pembayarannya per 31 Desember 2023 sebesar Rp79.696.684.428,00, dan dicatat sebagai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (DYDP) pada Neraca Kementerian Investasi/BKPM sebagaimana rincian berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Utama/Sekretariat Kementerian	12.607.690.118
2	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	3.586.414.278
3	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	20.735.312.638
4	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	16.440.387.157
5	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	888.444.000
6	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	8.131.994.957
7	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	17.306.441.280
Total		76.696.684.428

3) SPM Pembayaran Tahun 2024 dan SPM Penihilan

Terdapat 45 pekerjaan yang prestasi pekerjaannya telah mencapai 100% di akhir Desember 2023, namun proses pembayaran dari RPATA ke rekening pihak ketiga baru diproses pada awal Januari 2024, dan tidak terdapat pekerjaan yang tidak selesai di tahun 2023 atau berlanjut di tahun 2024.

Dari nilai DYDP sebesar Rp79.696.684.428,00 terdapat 3 tagihan yang tidak direalisasikan 100% pencairannya senilai Rp Rp364.575.824,00, sehingga nilai SPM Pembayaran di Tahun 2024 menjadi sebesar Rp Rp79.332.108.604,00 dan SPM pembayaran dimaksud dicatat sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga pada Neraca Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023. SPM Pembayaran dan Penihilan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

- *Daftar SPM Pembayaran:*

(Dalam Rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Sekretariat Utama/Sekretariat Kementerian	12.607.690.118
2	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	3.586.414.278
3	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	20.411.305.858
4	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	16.399.818.113
5	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	888.444.000
6	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	8.131.994.957
7	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	17.306.441.280
Total SPM Pembayaran		79.332.108.604

- *Daftar SPM Penihilan:*

(Dalam Rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	324.006.780
2	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	40.569.044
Total SPM Penihilan		364.575.824

Rincian Pekerjaan dan Daftar SPM atas Pelaksanaan RPATA dijabarkan dalam **Lampiran 7** laporan keuangan ini.

e. Pengungkapan atas Transaksi Resiprokal

Pada Tahun Anggaran 2023, terdapat perikatan kerjasama swakelola dengan pihak Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk 2 kegiatan kajian pada satuan kerja Kantor Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Perikatan dimaksud menyebabkan timbulnya transaksi resiprokal akibat belanja dari pihak pembayar pekerjaan dalam hal ini Satuan Kerja Kantor Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal berasal dari APBN, dan pihak penerima pekerjaan dalam hal ini ITB mencatat penerimaan pekerjaan tersebut sebagai pendapatan negara. Nilai total yang dicatat sebagai transaksi resiprokal adalah sebesar Rp399.480.986,00, dengan rincian sebagaimana dijabarkan dalam **Lampiran 12** laporan keuangan ini.

Catatan Penting Lainnya atas Neraca

Pada Aset Lain-lain Kementerian Investasi/BKPM per 31 Desember 2023 terdapat deposit sewa ruang kantor pada kantor perwakilan BKPM di Luar Negeri, *Indonesia Investment Promotion Center (IIPC)*, yang masih berada pada pemilik Gedung sebesar Rp6.468.490.493,00. Pelaksanaan pembayaran atas sewa kantor dimaksud dilaksanakan per tahun, namun demikian dalam Surat Perjanjian Sewa telah ditetapkan masa sewa dengan rincian sebagai berikut:

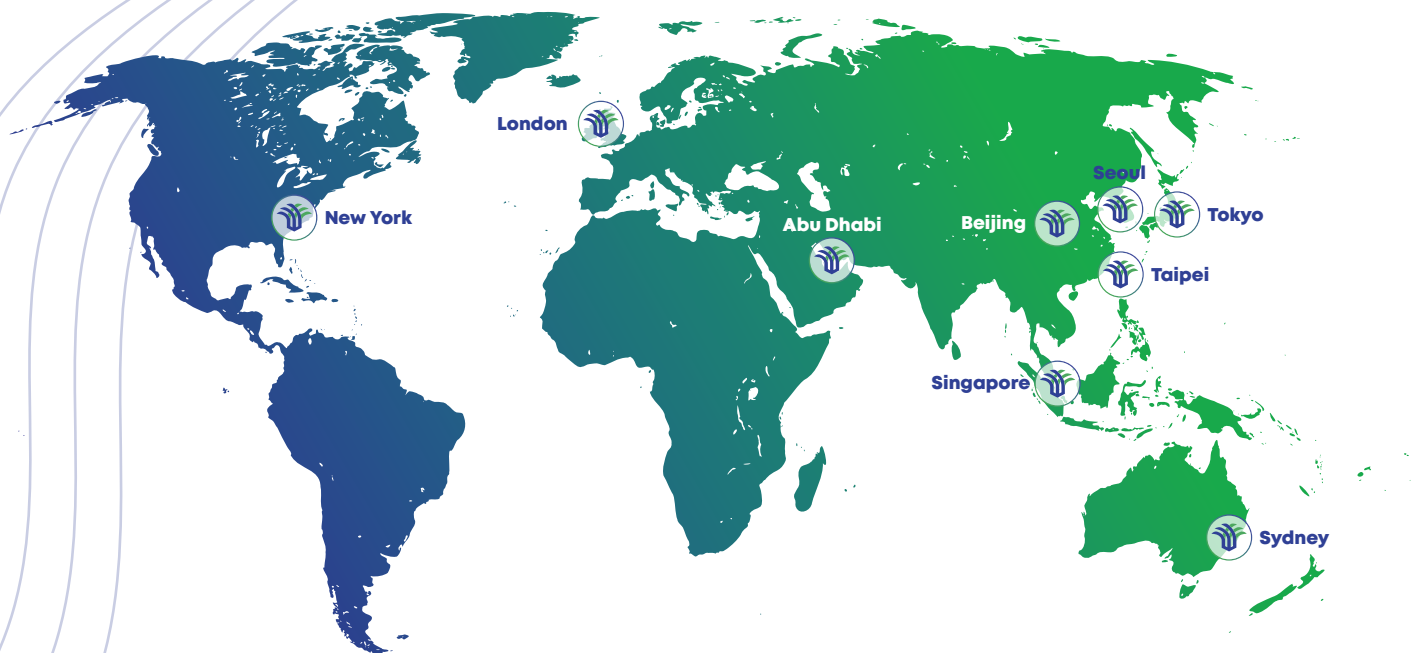
No	Pemilik Gedung (Lessor)	IIPC (Lessee)	Periode Kontrak	
			Mulai	Berakhir
1	Fukoku Mutual Seimei Insurance Company	Tokyo, Jepang	1 Juni 2021	31 Mei 2024
2	Suntec Real Estate Investment Trust	Singapura	15 Mei 2022	14 Mei 2025
3	Servcorp Administration Services Ltd	Abu Dhabi, UEA	1 April 2022	31 Maret 2025
4	Sherwood 370 Lexington LLC (d/h)	New York, USA	1 April 2021	31 Mei 2026
5	Landmark Space Limited	London, Inggris	1 Juni 2023	31 Desember 2024
6	Perpetual Trustee Company Limited	Sydney, Australia	1 Januari 2021	31 Desember 2024
7	SIFC Tower One Development YH	Seoul, Korea Selatan	13 Januari 2014	12 Januari 2024

Jakarta, 20 Mei 2024

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal



Bahil Lakadalia



Indonesia Investment Promotion Center (IIPC)



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

Investasi Tumbuh, Indonesia Maju

Jl. Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190